

TAK HANYA PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

## Hingga Juli, 22 Pelanggar Perda Jalani Tipiring

YOGYA (KR) - Satpol PP Kota Yogya tidak hanya mengedepankan aspek yustisi melainkan juga nonyustisi dalam menegakkan peraturan daerah (perda). Khusus untuk yustisi, total terdapat 22 pelanggar perda yang sudah menjalani tindak pidana ringan (tipiring) sepanjang tahun ini hingga Juli.

Kepala Satpol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan terkait masalah persampahan pihaknya selalu melakukan upaya persuasif dan represif melalui kegiatan penjagaan, penghaluan, pembinaan dan sosialisasi baik di masyarakat ataupun menjadi narasumber pada perangkat daerah terkait. "Upaya represif baik represif nonyustisi ataupun yustisi juga sudah kami lakukan," katanya, Senin (8/7).

Menurutnya, sepanjang tahun ini hasil penyidikan pelanggaran perda yang sampai ke tahapan sidang tipiring dan diputus denda oleh Pengadilan Negeri Yogya hingga Juli ini mencapai 22 pelanggar. Jumlah itu tidak hanya pelanggaran perda tentang pengelolaan sampah saja namun pelanggaran perda lainnya. Sebanyak 22 pelanggar di antaranya melanggar perda tentang penataan pedagang kaki lima dengan satu orang pelanggar yang didenda sebesar Rp 250.000. Pelanggaran perda tentang pengelolaan sampah sebanyak tiga orang dengan denda sanksi Rp 300.000.

Kemudian pelanggaran perda tentang bangunan gedung sebanyak tiga orang dengan denda Rp 2.000.000. Pelanggaran perda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik sebanyak satu

orang dengan denda Rp 5.000.000. Pelanggaran perda tentang perpajakan sebanyak enam orang dengan denda Rp 1.800.000. Pelanggaran perda tentang penyelenggaraan reklame sebanyak dua orang pelanggar yang didenda Rp 1.750.000. Pelanggaran perda tentang pemotongan hewan dan penanganan daging sebanyak enam orang yang didenda Rp 1.550.000.

Octo menjelaskan jajarannya memegang prinsip ultimatum remidium untuk menjaga kenyamanan di Kota Yogya agar masyarakat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya pun juga terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti dengan Polresta, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Yogya. "Selain dengan instansi vertikal, upaya pembinaan dan pendampingan juga terus kami lakukan kepada perangkat daerah pengampu perda, seperti pengampu perda tentang pengawasan mutu pangan dan izin pemotongan hewan pada Dinas Pertanian Pangan, pengampu pengawasan dan penegakan perpajakan pada Dinas Perhubungan dan lainnya," urainya.

Sementara Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, mengatakan pihaknya juga telah melakukan pen-

guatan operasi penegakan Perda 10/2021 terkait pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut penting dilakukan agar meningkatkan pemahaman personel Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Menutunya, dalam penegakan perda tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan yustisi yang menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku ataupun dengan nonyustisi yang berupa imbauan atau teguran.

Terkait upaya menekan volume sampah di Kota Yogya, Pemkot akan meluncurkan Gerakan Organik Jogja. Gerakan ini mendorong masyarakat mengolah sampah organik mulai dari rumah sehingga jumlah sampah yang dibuang akan semakin berkurang. "Sosialisasi gerakan ini akan dimulai minggu depan dengan melibatkan kader TP PKK Kota Yogya. Para kader TP PKK akan turun hingga berbasis RT. Salah satunya lewat pertemuan RT seperti arisan. Ini akan kita galakkan mulai minggu depan," ujar Aman.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya juga akan bekerja sama dengan forum bank sampah di Kota Yogya yang jumlahnya mencapai 2.000 titik. Menurutnya hasil dari pengolahan sampah organik tersebut dapat diolah oleh warga menjadi berbagai macam manfaat. Seperti pupuk kompos jika sampah organik diolah dengan metode biopori. "Kemudian untuk yang belum diolah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak," jelasnya. (Dhi)-d

BERKOMITMEN TERUS DILANJUTKAN

## ITF Bawuran Diharapkan Jadi Solusi Pengolahan Sampah

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berkomitmen untuk melanjutkan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran Bantul. Meski keterbatasan anggaran sempat menjadi kendala, karena pembangunan ITF membutuhkan dana besar, sehingga harus dialokasikan secara bertahap. Karena jika operasional ITF Bawuran ke depan dapat dilaksanakan bukan tidak mungkin kapasitasnya bisa mengolah semua sampah di wilayah DIY.

"Karena tanah di sana luas, harapan saya tidak hanya Bantul sama Kota Yogya saja. Siapa tahu nanti Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul juga bisa ke sana. Kita kan sudah sepakat, untuk pelaksanaan itu. Justru bagi kami Bawuran itu sebagai bentuk sampah menjadi bahan baku industri bukan sekadar sampah dibuang, tapi menjadi bagian dari industrialisasi," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Senin (8/7).

Sultan berharap ITF Bawuran dapat menjadi solusi pengelolaan sampah dan pengembangan industri di DIY, tidak hanya untuk Bantul dan Kota Yogyakarta, tapi juga untuk Kabupaten lain di DIY. Walaupun untuk saat ini tempat pengolahan sampah di Bawuran belum beroperasi, karena masih dalam tahap pembangunan. Hal itu dikarenakan proyek strategis tersebut tidak hanya bisa

diselesaikan dalam satu tahap, tapi butuh beberapa tahap.

"Tahap kedua (pembangunan) baru tahun ini. Ya *anggarane kan raisa* satu tahap. Harus dua tahap. Nanti kan dimulai, kita kan sudah sepakat untuk pelaksanaan itu. Produknya kan ada dan kita sudah tahu, bisa jadi mebel dan sebagainya, bukan sekadar sampah jadi pupuk. Pupuk itu hanya 20 persen sisanya bahan baku industri dari sampah," terangnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menyatakan, proyek ITF

Bawuran tetap berjalan dan tidak dibatalkan. Bahkan sudah ada calon investor dari Amerika Serikat yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek ini.

"(ITF Bawuran) itu kan proses industri, jadi butuh investasi dan Gubernur juga sepakat. Investasi kan tidak jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang. Nantinya (sampah) juga diolah tidak hanya sampah, tapi bahan baku industri. Nanti (pengolahan) sampah skala besar di sana, satu olah sampah dan satu lagi mengolah hasil sampah," tambahnya. (Ria)-d



**BANK BPD DIY syariah**

## Selamat Datang Jamaah Haji DIY

Semoga Menjadi Haji Maburr

**Persiapkan haji sejak dini dengan  
Tabungan Shafa Haji Muda**

Call Center 1500061 | Bank BPD DIY | www.bpddiy.co.id

## PERSIAPAN PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN TAK ADA KENDALA Caleg Terpilih Selesaikan LHKPN

YOGYA (KR) - Seluruh calon legislatif (caleg) terpilih untuk kursi DPRD Kota Yogya periode 2024-2029 sudah berhasil menyelesaikan proses administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sesuai ketentuan, penyerahan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan atau maksimal 20 Juli 2024.

Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, menjelaskan para caleg terpilih tidak menemui kendala dalam pengumpulan LHKPN. "Keluhan juga tidak ada, terutama anggota dewan lama yang terpilih kembali karena sudah menjadi lembaga negara. Semua caleg terpilih dari

Kota Yogya juga sudah menyampaikan LHKPN ke KPK," jelasnya, Senin (8/7). Penyerahan LHKPN yang tidak mendekati batas akhir memang sangat dianjurkan. Meski demikian rata-rata caleg terpilih dari Kota Yogya belum menerima hasil verifikasi LHKPN berupa surat tanda terima dari KPK. "Kalau pengumpulan ke KPK semuanya sudah. Tapi administrasinya kan ada semacam tanda terima dari KPK. Nah, itu belum dapat. Mungkin, masih antre, karena ribuan," imbuh Erizal.

Oleh karena itu kelanjutan proses administrasi untuk pengajuan pelantikan terhadap caleg terpilih masih menunggu tanda terima LHKPN dari KPK. Tanda terima itu akan disampaikan ke Gubernur DIY melalui Walikota Yogya

untuk proses pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Kota Yogya 2024-2029. Sesuai rencana, prosesi pelantikan anggota dewan akan digelar pada 12 Agustus 2024 mendatang. Total ada 40 anggota DPRD Kota Yogya yang diwakili oleh delapan partai politik. Paling banyak dari PDI Perjuangan dengan 11 kursi. Disusul Partai Gerindra lima kursi, PKS lima kursi, Partai Golkar lima kursi, PAN empat kursi, Partai NasDem empat kursi, PPP empat kursi dan PKB dua kursi.

Terkait persiapan pelantikan bagi anggota dewan terpilih juga tidak menemui kendala. Setelah ada penetapan dari KPU Kota Yogya, jajaran Sekretariat DPRD Kota Yogya juga sudah mengundang seluruh caleg terpilih. (Dhi)-d

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

## KB TAK SEBATAS PENGENDALIAN JUMLAH ANAK Perlu Terobosan untuk Sentuh Kelompok Remaja

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya menaruh perhatian terhadap keberlangsungan program keluarga berencana (KB). Program tersebut dinilai tidak sebatas pengendalian jumlah anak melainkan keluarga yang memiliki perencanaan kuat agar mampu sejahtera. Sehingga program itu pun perlu disosialisasikan sejak dini dan menyentuh kalangan anak, remaja, dewasa, orangtua maupun lansia.

Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi SE MM, mengungkapkan muara atas keberhasilan program KB ialah kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu remaja juga memiliki peran penting agar sebelum merajut pernikahan telah memiliki perencanaan matang. "Sosialisasi untuk kalangan remaja ini perlu terobosan. Bagaimana agar remaja juga tertarik dan ikut mendukung program KB," ungkapnya.

Keterlibatan para remaja dalam berbagai program di pemerintah kerap kali masih cukup rendah. Fahmi mencontohkan, meski posyandu remaja sudah terbentuk di Kota Yogya namun ketika diun-

M Ali Fahmi SE MM  
Komisi D



KR-Istimewa

dang mengikuti sosialisasi ternyata tingkat kepesertaannya masih minim. Berbeda dengan posyandu lansia yang cukup aktif berkegiatan.

Menurut Fahmi, selama ini banyak yang masih beranggapan titik tekan program KB ialah dua anak cukup atau dua anak lebih baik. Padahal di dalamnya juga ada kegiatan pemberdayaan eko-

nomi guna mendukung kesejahteraan keluarga. Sehingga ketika memiliki anak lebih dari dua maka kesejahteraan anak maupun keluarga tetap terjamin. "Kesejahteraan ini pun tidak sebatas kuat dari aspek ekonomi tetapi juga kesehatan dan pertumbuhan anak. Makanya saling berkaitan juga dengan bebas stunting yang sekarang cukup digencarkan di Kota Yogya. Harapan kami, OPD di lingkungan Pemkot juga bisa saling bersinergi untuk keberhasilan program KB secara menyeluruh," urainya.

Pihaknya di lembaga dewan juga berkomitmen mendukung keberlangsungan program tersebut. Misalnya dari aspek anggaran, sejauh ini setiap usulan program yang berkaitan dengan masyarakat tidak pernah dicoret. Begitu pula menyangkut legislasi sudah dipayungi melalui peraturan daerah (perda) terkait ketahanan keluarga. Perda tersebut merupakan produk hukum inisiatif dewan sehingga keberlangsungan program KB hingga soal penganggarnya memiliki payung yang jelas. (Dhi)-d